



RENCANA KERJA TAHUN 2023



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023.

Rencana Kerja ini merupakan dokumen yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023. Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, maka masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Semoga Rencana Kerja ini dapat menjadi acuan peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, 4 Agustus 2022

KEPALA BAPENDA

SUCHANTO, SE
Pembina
Nip. 19670317 199002 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	15
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	16
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	20
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	21
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	22
3.3. Program dan Kegiatan.....	23
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	27
BAB V PENUTUP	28

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun berjalan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah diawali Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah, sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD, selanjutnya perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah memuat program-program sebagai penjabaran Renstra SKPD dan RKPD, bertujuan untuk keselarasan dan kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah, dengan adanya Renja Perangkat Daerah akan

dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program K/L dan Provinsi. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA Perangkat Daerah dalam proses penyusunan RAPBD.

Berdasarkan hal tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kedepan dapat menjalankan tugas-tugas pokok dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dan akan menjadi komitmen kami yang dapat dituangkan dalam suatu perencanaan yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan dan pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupa “Rencana Kerja Tahun 2023”.

1. 2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pijakan dalam perumusan dan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
8. Keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 13 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6 ;
13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4) ;
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dimaksudkan sebagai Dokumen Perencanaan Program Kegiatan yang memuat sasaran yang akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Indikator kinerja sasaran dan target masing-masing indikator sasaran Program yang direncanakan dapat mendorong percepatan terwujudnya Visi, Misi, dan Program Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026.

Dengan demikian Rencana Kerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempedomani Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta menjadi Acuan Umum dalam menentukan Program dan Kegiatan yang akan dibahas dalam Rangkaian dan Forum musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten secara berjenjang sehingga dapat lebih terjamin dan mempermudah pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.

TUJUAN

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023 adalah untuk:

- Menjabarkan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati kedalam Bentuk Kebijakan dan Program Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan.
- Sebagai Instrumen untuk mempermudah dalam mengukur Kinerja dan mengevaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu tertentu.
- Meningkatkan Efisiensi dan efektifitas Pemanfaatan Sumber-sumber Potensi Daerah. Terutama berkaitan dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- Menjelaskan tugas – tugas pokok dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.4. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah melaksanakan 2 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Evaluasi pelaksanaan rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat realisasi Renja sebesar 100%, tingkat capaian realisasi target Renstra sebesar 16,67%
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan tingkat realisasi Renja sebesar 122,43%, tingkat capaian realisasi target Renstra sebesar 98,53 %

Program Utama yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2021 yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan realisasi Renja Tahun 2021 dari target sebesar 7,98% teralisasi sebesar 9,77% tingkat realisasi renja sebesar 122,43% dan tingkat capaian realisasi target Renstra sebesar 98,53%

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2022

KODE	URUSAN/BID. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2021 - 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2022 (n-1)		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5-7-9)	11 = (10/9)		
											TARGET RENJA TAHUN 2021 (n-2)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5-7-9)	11 = (10/9)	12	
6.02	KEUANGAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai AKIP	83 70		78,34 66,99	79,48 60,46	100,82% 88,30%	79,80 69,60	79,00 69,00	85,18% 98,87%		
6.02. 01	PROGRAM PERLUANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Pemenuhan penyediaan komponen penjangkauan layanan	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	100 %	10,67%		
6.02. 01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38		9 Dokumen	9 Dokumen	100%	8 Dokumen	14 Dokumen	36,84%		
6.02. 01.2.01.01	Perencanaan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	32		8 Dokumen	8 Dokumen	100%	4 Dokumen	12 Dokumen	37,50%		
6.02. 01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Realisasi Capaian Kinerja	72		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	33,33%		
6.02. 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	6		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	33,33%		
6.02. 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	339		49 Orang	49 Orang	100%	55 Orang	104 Orang	30,68%		
6.02. 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Waku Penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	102		22 Orang	22 Orang	100%	18 Orang	38 Orang	37,25%		
6.02. 01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Administrasi SKPD	Jumlah Jurnal Keuangan SKPD	60		Laporan	Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20,00%		
6.02. 01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Administrasi SKPD	Jumlah Buku Besar Keuangan SKPD	60		Laporan	Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20,00%		
6.02. 01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Triwulan/Semester/ SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD	6		Dokumen	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20,00%		
6.02. 01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60		Laporan	Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20,00%		
6.02. 01.2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	6		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	33,33%		
6.02. 01.2.06.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beselasi Akibat Ketergapatannya	Jumlah Pakaian Dinas Beselasi Akibat Ketergapatannya	848		128 Setel	128 Setel	100%	135 Setel	263 Setel	31,01%		
6.02. 01.2.06.08	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berprestasi Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	50		Orang	Orang		10 Orang	10 Orang	20,00%		
6.02. 01.2.05.11	Bindegan Tejara Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bindegan Tejara	48		4 Orang	4 Orang	100%	8 Orang	12 Orang	25,00%		
6.02. 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Uraian Perangkat Daerah	72		Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24 Bulan	33,33%		
6.02. 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Intisai Lain/ri Penerimaan Banguan Kantor	Jumlah Komponen Intisai Lain/ri Penerimaan Banguan Kantor	2.250		Buah	375 Buah	100%	375 Buah	750 Buah	33,33%		
6.02. 01.2.06.02	Penyediaan Perbaikan dan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan dan Peralengkapan Kantor	28.910		Buah	4.985 Buah	100%	4.985 Buah	9.970 Buah	33,33%		
6.02. 01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang dididirikan	5.464		Kotak	881 Kotak	96%	914 Kotak	1.795 Kotak	32,73%		
6.02. 01.2.06.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	152.496		Buah	24.091 Buah	96%	25.416 Buah	50.407 Buah	33,09%		
6.02. 01.2.06.08	Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Penunjang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Penunjang-Undangan	10.800		Eksemplar	1.900 Eksemplar	100%	1.900 Eksemplar	3.800 Eksemplar	33,33%		
6.02. 01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72		Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24 Bulan	33,33%		

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12	
5.02. 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemeliharaan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemeliharaan Daerah	354	Unit	96	Unit	16%	91	Unit	186	Unit	20,84%
5.02. 01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Roda 4	1	Unit		Unit		-	Unit	0	Unit	0,00%
5.02. 01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Roda 4	2	Unit		Unit		-	Unit	0	Unit	0,00%
		Jumlah Kendaraan Roda 2	2	Unit		Unit		-	Unit	0	Unit	0,00%
5.02. 01.2.07.06	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	100	Set		Set		20	Set	20	Set	20,00%
5.02. 01.2.07.06	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya	245	Unit	95	Unit		70	Unit	70	Unit	28,57%
5.02. 01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	6	Unit		Unit		1	Unit	1	Unit	20,00%
5.02. 01.2.07.08	Penyediaan Jasa Penunjang Unsur Pemeliharaan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Unsur Pemeliharaan Daerah	72	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	24	Bulan	33,33%
5.02. 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	24	Bulan	33,33%
5.02. 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	24	Bulan	33,33%
5.02. 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Jasa Pelayanan Umum Kantor	72	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	24	Bulan	33,33%
5.02. 01.2.09	Penelitian dan Pengembangan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemeliharaan Daerah	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemeliharaan Daerah	964	Unit	181	Unit	100%	178	Unit	359	Unit	37,24%
5.02. 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6	Unit	1	Unit	100%	1	Unit	2	Unit	33,33%
5.02. 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	282	Unit	41	Unit	100%	41	Unit	82	Unit	31,20%
5.02. 01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	67	Unit		Unit		13	Unit	13	Unit	19,40%
5.02. 01.2.09.06	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	613	Unit	138	Unit	100%	120	Unit	258	Unit	42,09%
5.02. 01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16	Unit	1	Unit	100%	3	Unit	4	Unit	25,00%
5.02. 04	PROGRAM PENGELUARAN PENDAPATAN DAERAH	Penertasa Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,18	%	7,88	%	132,43%	8,06	%	8,06	%	96,83%
5.02. 04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Penertasa Pendapatan Asli Daerah	136.480.344.800,00		120.000.000.000,00		101,59%	96.135.351.000,00		96.135.351.000,00		70,44%
5.02. 04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Penertasa: Pengelolaan Daerah	12	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	4	Dokumen	33,33%
		Jumlah Raperf Koordinasi Penyusunan Rencana Penertasa: Pengelolaan	2	Kotak	2	Kotak	100%	2	Kotak	2	Kotak	100,00%
		Jumlah Laporan Pembahasan Penertaman Dana Transak	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	12	Laporan	100,00%
5.02. 04.2.01.02	Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Pajak Daerah	8	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	2	Dokumen	25,00%
		Jumlah Produk Hukum Pengelolaan Pajak Daerah	8	Produk Hukum	3	Produk Hukum	100%	1	Produk Hukum	4	Produk Hukum	66,67%
5.02. 04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyibkungan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Penyuluhan Pajak Daerah	47	Kali	3	Kali	100%	6	Kali	11	Kali	23,40%
5.02. 04.2.01.04	Penyediaan Barana dan Peralana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Barana dan Peralana Pengelolaan Pajak Daerah	7	Unit		Unit		3	Unit	3	Unit	42,86%
5.02. 04.2.01.05	Penelitian dan Pendidikan Objek Pajak Daerah	Jumlah Pendidikan dan Penelitian Pajak Daerah	14.450	OPWP	7.450	OPWP	107%	1.300	OPWP	9.249	OPWP	64,01%
		Jumlah Pendidikan dan Penelitian PBB P2	76.000	OPWP		OPWP		15.000	OPWP	15.000	OPWP	19,74%
		Jumlah Pendidikan dan Penelitian BPHTB	3.260	OPWP		OPWP		550	OPWP	550	OPWP	16,82%

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7%)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
5.02 04.2.01.08	Pengujian, Penilaian dan Pelaksanaan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Pengujian, Penilaian, dan Pengoran Basis Data Pajak Daerah	4		5	Apikasi	100%	4	Apikasi	225,50%	
5.02 04.2.01.07	Periklan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah SPPT PBB P2 yang ditetapkan	181.000		SPPT PBB-P2	110.777	100%	15.000	SPPT PBB-P2	69,46%	
5.02 04.2.01.08	Pendataan Wajib Pajak Daerah	Jumlah SSPD BPHTB yang ditetapkan	3.700		SSPD BPHTB	1.243	278%	550	SSPD BPHTB	48,46%	
5.02 04.2.01.09	Penetapan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah SSPD yang ditetapkan	12.500		SSPD			2.000	SSPD	16,00%	
5.02 04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pengoran Pajak Daerah	Jumlah SPPT yang diterbitkan	843.500		SPPT PBB-P2	SPPT PBB-P2		108.000	SPPT PBB-P2	19,89%	
5.02 04.2.01.11	Penelitian Kebutuhan Pajak Daerah	Jumlah WP yang berkontribusi tentang Pajak Daerah	200		WP	WP		40	WP	20,00%	
5.02 04.2.01.12	Pengendalian, Pemeliharaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah SPPTD yang terak	42.400		SPPTD	SPPTD		8.000	SPPTD	18,87%	
5.02 04.2.01.13	Pengendalian, Pemeliharaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah SSPD BPHTB yang terak	3.250		SSPD BPHTB	SSPD BPHTB		650	SSPD BPHTB	16,92%	
5.02 04.2.01.14	Pengendalian, Pemeliharaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah SSPD yang ditagih	30.208		SSPD	SSPD		5.888	SSPD	16,82%	
5.02 04.2.01.15	Pengendalian, Pemeliharaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah SPPT PBB P2 yang ditagih	250		SPPT PBB-P2	SPPT PBB-P2		50	SPPT PBB-P2	20,00%	
5.02 04.2.01.16	Pengendalian, Pemeliharaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Keberatan Pajak Daerah yang diselesaikan	125		125 OP	125 OP		25	125 OP	20,00%	
5.02 04.2.01.17	Pengendalian, Pemeliharaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Penertiban dan Pemaksaan Pajak Daerah	485		WP	20	100%	75	WP	15,19%	
5.02 04.2.01.18	Pengendalian, Pemeliharaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Pemeliharaan Data OP PBB	5.100		OPWP	OPWP		100	OPWP	19,61%	
5.02 04.2.01.19	Pemeliharaan dan Pengawasan Pengeluaran Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Penertiban Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	72		Laporan	12	100%	12	Laporan	33,33%	
5.02 04.2.01.20	Pemeliharaan dan Pengawasan Pengeluaran Retribusi Daerah	Jumlah Pembiayaan dan Pengawasan Pengeluaran Retribusi Daerah	20		Kali	Kali		4	Kali	20,00%	
5.02 04.2.01.21	Pemeliharaan dan Pengawasan Pengeluaran Retribusi Daerah	Jumlah Jenis Pelayanan Berbasis Harga	40		Jenis	40	100%	Jenis	Jenis	100,00%	

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi, selanjutnya kedepan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan.

Capaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, sebagai berikut:

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH			REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2021 (thn n-2)	TAHUN 2022 (thn n-1)	TAHUN 2023 (thn n)	TAHUN 2021 (thn n-2)	TAHUN 2022 (thn n-1)	TAHUN 2023 (thn n)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	%		7,98	8,06	8,12	9,77				Realisasi capaian Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2021 dari target 7,98% terealisasi sebesar 9,77%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat			78,24	79	80	78,88				Realisasi capaian IKM Tahun 2021 dari target 78,24 terealisasi sebesar 78,88

Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 diukur dari target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja Tahun 2021 dan target Indikator Kinerja Utama Renstra Badan Pendapatan Daerah dengan Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja antara lain :

1. Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah dari target 7,98% terealisasi sebesar 9,77% dengan tingkat realisasi sebesar 122,43% dan tingkat capaian realisasi target Renstra sebesar 98,53%
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan target Renja sebesar 78,24 terealisasi sebesar 78,88 dengan tingkat realisasi sebesar 100,82% dan tingkat capaian realisasi target Renstra sebesar 95,18%

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan.

Dalam upaya mewujudkan misi, tujuan, dan sasaran sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan internal maupun eksternal yang menjadi tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, sebagai berikut :

Kekuatan yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengelola Pendapatan Daerah antara lain :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai dasar dalam pengelolaan pendapatan asli daerah.
2. Tersedianya anggaran/dana yang bersumber dari APBD untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Adapun Kelemahan yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

1. Sumber daya manusia yang belum memadai khususnya dalam hal pendapatan daerah
2. Masih kurangnya fasilitas untuk mengembangkan upaya pemungutan pajak/retribusi daerah

Peluang yang dimiliki oleh Badan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah
2. Adanya sistem dan prosedur serta pelimpahan wewenang sebagai dasar dan acuan mengelola keuangan daerah.
3. Kemajuan teknologi informasi dalam menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik.

Beberapa permasalahan yang masih menjadi tantangan (ancaman) dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah antara lain Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Adanya motivasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yang didukung dengan regulasi peraturan di daerah, anggaran yang memadai yang ditunjang ketersediaan personil dan mobilitas operasional yang memadai untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah secara transparan. Peluang / potensi yang ada masih dapat untuk diberdayakan, apalagi kalau didukung oleh Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, ditunjang dengan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Tupoksi Badan Pendapatan Daerah dapat dilaksanakan secara maksimal dengan memanfaatkan kewenangan dan ketersediaan anggaran dan sarana yang ada untuk meningkatkan Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah. Diterapkannya sistem informasi manajemen Pendapatan Daerah, memadainya aparatur Badan Pendapatan Daerah baik kualitas maupun kuantitas, serta meningkatkan peran Badan Pendapatan Daerah untuk menghadapi berbagai tantangan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran agar dapat dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka pada Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan berbagai kegiatan yang penjabarannya dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam rancangan awal RKPD diambil berdasarkan analisis kebutuhan dari tiap bidang yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, namun seiring dengan berjalannya waktu terdapat perubahan-perubahan kegiatan karena disesuaikan dengan kebutuhan yang diprioritaskan.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD disajikan pada tabel berikut :

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KABUPATEN TANJUNGPURA BARAT

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
5.02	2 KEUANGAN	3	4	5	6 18.094.000.000	7 KEUANGAN	8	9	10	11 20.195.250.000	12
5.02. 01	PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG		Persentase Pendeptapan Asil Daerah terhadap Pendeptapan Daerah	100%	13.018.750.000	PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG		Persentase penyediaan komponen penunjang pelayanan kantor	100%	14.120.000.000	
5.02. 01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanj. Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	126.750.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanj. Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	250.000.000	
5.02. 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanj. Barat	Jumlah dokumen perencanaan	8 Dokumen	78.750.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanj. Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan	8 Dokumen	100.000.000	
5.02. 01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Kinerja SKPD	BAPENDA Kab. Tanj. Barat	Jumlah Laporan realisasi capaian kinerja	12 Laporan	40.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Kinerja SKPD	BAPENDA Kab. Tanj. Barat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	12 Laporan	150.000.000	
5.02. 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	8.511.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	8.650.000.000	
5.02. 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BAPENDA Kab. Tanj. Barat	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	55 orang	8.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BAPENDA Kab. Tanj. Barat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	8.000.000.000	
5.02. 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BAPENDA Kab. Tanj. Barat	Jumlah penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16 orang	425.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BAPENDA Kab. Tanj. Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	425.000.000	
5.02. 01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	BAPENDA Kab. Tanj. Barat	Jumlah Juml Keuangan SKPD	12 Laporan	43.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	BAPENDA Kab. Tanj. Barat	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD		50.000.000	
5.02. 01.2.02.07			Jumlah Buku Besar Keuangan SKPD	12 Laporan							
5.02. 01.2.02.08		BAPENDA Kab. Tanj. Barat	Jumlah Laporan Keuangan SKPD	12 Laporan	43.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BAPENDA Kab. Tanj. Barat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	12 Laporan	175.000.000	
5.02. 01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	58.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	75.000.000	
5.02. 01.2.03.00	Pelaksanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPENDA Kab. Tanj. Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	58.000.000	Pelaksanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPENDA Kab. Tanj. Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	75.000.000	
5.02. 01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	305.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	305.000.000	
5.02. 01.2.05.00	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Akibat Kelelepannya	BAPENDA Kab. Tanj. Barat	Jumlah Pakelan Dinas beserta Akibat Kelelepannya	140 Pakel	180.000.000	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Akibat Kelelepannya	BAPENDA Kab. Tanj. Barat	Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Akibat Kelelepannya	2 Paket	180.000.000	
5.02. 01.2.05.06	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BAPENDA Kab. Tanj. Barat	Jumlah pegawai yang mengikuti Pelatihan	10 Orang	75.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BAPENDA Kab. Tanj. Barat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		75.000.000	
5.02. 01.2.05.11	Embingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BAPENDA Kab. Tanj. Barat	Jumlah pegawai yang mengikuti Embingan Teknis	8 orang	50.000.000	Embingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BAPENDA Kab. Tanj. Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Embingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	50.000.000	
5.02. 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah penyediaan Umum Perangkat Daerah	12 bulan	1.273.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan penyediaan Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	1.475.000.000	
5.02. 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BAPENDA Kab. Tanj. Barat	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	374 bush	50.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BAPENDA Kab. Tanj. Barat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	75.000.000	
5.02. 01.2.06.02	Penyediaan Peralihan dan Pengkengkapan Kantor	BAPENDA Kab. Tanj. Barat	Jumlah Peralihan dan Pengkengkapan Kantor	4.995 bush	200.000.000	Penyediaan Peralihan dan Pengkengkapan Kantor	BAPENDA Kab. Tanj. Barat	Jumlah Paket Peralihan dan Pengkengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	350.000.000	
5.02. 01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BAPENDA Kab. Tanj. Barat	Jumlah penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	914 kotak	40.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BAPENDA Kab. Tanj. Barat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	40.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Pending		
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
5.02. 01. 2.05.02	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02. 01. 2.05.02	Pengadaan Barang Cetak dan Pengendalian	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Barang Cetak dan Pengendalian	25.416 buah	175.000.000	Pengadaan Barang Cetak dan Pengendalian	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengendalian yang Disediakan	3 Paket	200.000.000	
5.02. 01. 2.05.02	Persediaan Bahan Baku dan Perencanaan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Persediaan Bahan Baku dan Perencanaan	1.800 eslempir	8.000.000	Persediaan Bahan Baku dan Perencanaan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perencanaan yang Disediakan	12 Dokumen	10.000.000	
5.02. 01. 2.05.02	Pengelolaan Rapel Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah waktu penyediaan Rapel Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	800.000.000	Pengelolaan Rapel Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Rapel Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	800.000.000	
5.02. 01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45 unit	1.620.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.060.000.000	
5.02. 01. 2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Kendaraan roda 4	1 unit	400.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		500.000.000	
5.02. 01. 2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Kendaraan roda 4	1 unit	720.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	860.000.000	
5.02. 01. 2.07.02	Pengadaan Mebel	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Mebel	20 set	110.000.000	Pengadaan Mebel	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	150.000.000	
5.02. 01. 2.07.02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	20 unit	150.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	450.000.000	
5.02. 01. 2.07.02	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1 unit	100.000.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		100.000.000	
5.02. 01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	385.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	400.000.000	
5.02. 01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	15.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.000.000	
5.02. 01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	300.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	300.000.000	
5.02. 01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah waktu penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	70.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	85.000.000	
5.02. 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160 unit	740.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	905.000.000	
5.02. 01. 2.09.01	Persediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas Jabatan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	75.000.000	Persediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas Jabatan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pagawey	1 Unit	100.000.000	
5.02. 01. 2.09.02	Persediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45 unit	280.000.000	Persediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perbiannya	45 Unit	300.000.000	
5.02. 01. 2.09.02	Pemeliharaan Mebel	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Mebel yang dipelihara	11 unit	5.000.000	Pemeliharaan Mebel	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Mebel yang Dipelihara		5.000.000	
5.02. 01. 2.09.08	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	100 unit	195.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	300.000.000	
5.02. 01. 2.09.08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 unit	195.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	3 Unit	200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Persentase Penerimaan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,12 %	6.075.250.000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Persentase Penerimaan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,12 %	6.075.250.000	
5.02 04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	101.660.000.000	6.075.250.000	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	101.660.000.000,00	6.075.250.000	
5.02 04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Rencana Penetapan Pendapatan Daerah	2 Dokumen	262.500.000	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	262.500.000	
5.02 04.2.01.02	Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Kebijakan Pajak Daerah	2 dokumen	250.000.000	Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pendebitan Pajak	3 Dokumen	250.000.000	
5.02 04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah produk hukum pengelolaan pajak daerah	1 produk hukum	417.000.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan	10 Laporan	417.000.000	
5.02 04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 unit	450.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	450.000.000	
5.02 04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah	1.350 CPWP	420.000.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	11 Laporan	435.000.000	
5.02 04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 aplikasi	650.000.000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan	650.000.000	
5.02 04.2.01.07	Pembelian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah SPPT PBB P2 yang ditetapkan	15.100 SPPT PBB P2	900.000.000	Pembelian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Objek Pajak yang Disediakan NUP nya	2500 Objek Pajak	710.000.000	
5.02 04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah SKPD yang ditetapkan	600 SSPD BPHTB	525.000.000	Penetapan Wajib Pajak Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Keputusan Pajak Daerah	3 Dokumen	700.000.000	
5.02 04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah WP yang berkonsultasi tentang Pajak Daerah	40 WP	150.000.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	40 Layanan	150.000.000	
5.02 04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah SPPTD yang terakumulasi	6.200 SPPTD	450.000.000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilekukan Penelitian dan	8 Dokumen	450.000.000	
5.02 04.2.01.11	Penghasilan Pajak Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah SPPT PBB P2 yang ditetapkan	50 SPPT PBB P2	960.000.000	Penghasilan Pajak Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penghasilan Pajak Daerah	10 Dokumen	960.000.000	
5.02 04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Keberatan Pajak Daerah yang diselesaikan	25 OP	125.000.000	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	20 Dokumen	125.000.000	
5.02 04.2.01.13	Pengendalian, Pemertasaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah pemertasaan dan pemertasaan pajak daerah	85 CPWP	300.000.000	Pengendalian, Pemertasaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pemertasaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	11 Dokumen	300.000.000	
5.02 04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	12 laporan	225.750.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Laporan	225.750.000	
			JUMLAH		10.084.000.000			JUMLAH		20.184.250.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program kegiatan yang akan dilaksanakan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD oleh karena itu penyusunan Rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Rancangan RKPD, dengan fokus terhadap kondisi Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan otonomi daerah yang paralel dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud dan amanat undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diperlukan suatu pedoman yang memberikan arahan dan strategi kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan Provinsi dan Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan Penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, Strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan Kerangka Pendanaan yang bersifat Indikatif.

Rencana Kerja Tahunan merupakan pedoman bagi terlaksananya pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan dari unsur pokok yang terdapat kewenangan, antara lain unsur pendapatan daerah, tentunya akan menjadi tanggung jawab seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah dan sekaligus untuk memberikan inspirasi, motivasi, inisiatif, kreatifitas serta pedoman di dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang. Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sejalan dengan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Daerah. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam waktu tahunan/periodik yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL.
TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2023
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Optimalisasi Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,12 %

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Program menjadi instrumen untuk menentukan sasaran yang diproyeksikan dengan memanfaatkan sumberdaya dan sumber dana tertentu. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

II. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

TABEL T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Kode	Usaha/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan (outcome)	Rencana Tahun 2023			Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	KEUANGAN				20.195.250.000				19.946.500.000
5.02. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA			100%	14.120.000.000			100%	13.489.500.000
5.02. 01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyediaan komponen penunjang pelayanan Kantor		9 Dokumen	250.000.000			5 Dokumen	300.000.000
5.02. 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	8 Dokumen	100.000.000	APBD		4 Dokumen	125.000.000
5.02. 01.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	12 Laporan	150.000.000	APBD		12 Laporan	175.000.000
5.02. 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah		1 Dokumen	8.656.000.000			1 Dokumen	8.905.000.000
5.02. 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menetima Gaji dan Tunjangan ASN	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	55 Orang/bulan	8.000.000.000	APBD		58 Orang/bulan	8.200.000.000
5.02. 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	1 Dokumen	425.000.000	APBD		1 Dokumen	450.000.000
5.02. 01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BAPENDA Kab.Tanjab Barat		50.000.000			2 Dokumen	75.000.000
5.02. 01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	12 Laporan	175.000.000	APBD		12 Laporan	180.000.000
5.02. 01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		12 Laporan	75.000.000			12 Laporan	85.000.000
5.02. 01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	12 Laporan	75.000.000	APBD		12 Laporan	85.000.000
5.02. 01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah		1 Dokumen	305.000.000			1 Dokumen	320.000.000
5.02. 01.2.05.02	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Keleengkapannya	Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Keleengkapan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	2 Paket	180.000.000	APBD		2 Paket	190.000.000
5.02. 01.2.05.08	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan pelatihan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat		75.000.000			10 Orang	80.000.000
5.02. 01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	8 Orang	50.000.000	APBD		8 orang	50.000.000
5.02. 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan Umum Perangkat Daerah		12 Laporan	1.475.000.000			12 Laporan	1.622.500.000
5.02. 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	1 Paket	75.000.000	APBD		1 Paket	85.000.000
5.02. 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	6 Paket	350.000.000	APBD		6 Paket	375.000.000

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan (outcome)	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	2 Paket	40.000.000	APBD	2 Paket	50.000.000
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	3 Paket	200.000.000	APBD	3 Paket	250.000.000
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	12 Dokumen	10.000.000	APBD	12 Dokumen	12.500.000
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	12 Laporan	800.000.000	APBD	12 Laporan	850.000.000
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	2.060.000.000		100 %	750.000.000
5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat		500.000.000			
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	5 Unit	880.000.000	APBD		
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	20 Unit	150.000.000	APBD	20 Unit	175.000.000
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	20 Unit	450.000.000	APBD	20 unit	475.000.000
5.02.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat		100.000.000		1 unit	100.000.000
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	12 Laporan	400.000.000		12 Laporan	445.000.000
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	12 Laporan	15.000.000	APBD	12 Laporan	20.000.000
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	12 Laporan	300.000.000	APBD	12 Laporan	325.000.000
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	12 Laporan	85.000.000	APBD	12 Laporan	100.000.000
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	905.000.000		100 %	1.056.000.000
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	1 Unit	100.000.000	APBD	1 unit	125.000.000
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	45 Unit	300.000.000	APBD	45 unit	325.000.000
5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	BAPENDA Kab.Tanjab Barat		5.000.000		14 unit	6.000.000
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	100 Unit	300.000.000	APBD	85 unit	350.000.000
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	3 Unit	200.000.000	APBD	3 unit	250.000.000

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan (outcome)	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
5.02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah		8,12 %	6.075.250.000	8,16 %	6.463.000.000
5.02 04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		101.660.000.000,00	6.075.250.000	111.945.600.000,00	6.463.000.000
5.02 04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	2 Dokumen	262.500.000	2 Dokumen	278.000.000
5.02 04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	3 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000
5.02 04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	10 Laporan	417.000.000	10 Laporan	520.000.000
5.02 04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	1 Unit	450.000.000	1 unit	500.000.000
5.02 04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	11 Laporan	435.000.000	11 Laporan	500.000.000
5.02 04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	4 Laporan	650.000.000	4 Laporan	850.000.000
5.02 04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Obyek Pajak 2500	710.000.000	Obyek Pajak 2500	745.000.000
5.02 04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	3 Dokumen	700.000.000	3 Dokumen	700.000.000
5.02 04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	40 Layanan	150.000.000	60 Layanan	150.000.000
5.02 04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	8 Dokumen	450.000.000	8 Dokumen	470.000.000
5.02 04.2.01.11	Pengalihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengalihan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	10 Dokumen	850.000.000	10 Dokumen	950.000.000
5.02 04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	20 Dokumen	125.000.000	40 Dokumen	150.000.000
5.02 04.2.01.13	Pengendalian, Pemertasaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	11 Dokumen	300.000.000	11 Dokumen	350.000.000
5.02 04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	16 Laporan	225.750.000	16 laporan	250.000.000
		JUMLAH			20.195.250.000		19.946.500.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen rencana Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu-isu strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, penyusunan program pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan terus berlanjut diprioritaskan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

No	Program dan Kegiatan	Sumber Dana
1	2	3
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	APBD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	APBD
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	APBD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	APBD
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	APBD
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	APBD

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja ini disusun sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana program dan kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangan yang dimiliki, sebagai bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu serta bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023.

Demikian Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023, dalam penyusunan dokumen ini maka saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan. Kami juga berharap agar dokumen ini dapat digunakan sebagai dasar dan bahan pertimbangan dalam menentukan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023.

Kuala Tungkal, 4 Agustus 2022



SUGIANTO, SE

Pembina

Nip. 19670317 199002 1 001